**PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDUNG**

**PROVINSI JAWA BARAT**

Indah Ayuni Salsabillah

NPP. 29.0659

*Asdaf Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat*

*Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*

 Email : indahsalsabillah20@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the accumulation of employee data in the city of Bandung which can be seen in the list of online-based personnel management status lists with the Personnel Management Information System (SIMPEG). **Purpose:** This study aims to determine the management of the Civil Service Management Information System in the city of Bandung. **Method:** This study uses a qualitative method with a descriptive approach based on the Elements of Management theory. Data collection techniques used are interviews, observations and documents. **Result:** The results in the field state that based on the 6 indicators (Men, Money, Method, Materials, Machine, Market) it cannot be said to be completely good. Employees in the Bandung City Government Environment still do not understand the procedure for using SIMPEG due to the lack of socialization carried out. There is no normative basis that contains special rules regarding the implementation and management of SIMPEG in the city of Bandung. **Conclusion:** Based on the description of the Theory of Management Elements in the field, SIMPEG management in Bandung is good. However, there is still a need for efforts from the Bandung City BKPSDM to be able to provide periodic socialization and training to management employees and SIMPEG users as well as to maximize facilities and infrastructure and also to follow up on the normative basis regarding the management and implementation of SIMPEG in Bandung City.

**Keywords: Management, Employee, SIMPEG, Management**

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada penumpukan data pegawai di Kota Bandung yang terlihat pada daftar status pengelolaan manajemen kepegawaiatan berbasis *online* dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawain di Kota Bandung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif berdasarkan teori Unsur Manajemen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metode wawancara, observasi dan dokumen. **Hasil/Temuan:** Hasil di lapangan menyatakan bahwa berdasarkan ke – 6 indikator (*Men, Money, Methode, Materials, Machine, Market*) belum dapat dikatakan sepenuhnya baik. Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung masih belum memahami prosedur penggunaan SIMPEG yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Belum adanya landasan normatif yang memuat aturan khusus mengenai pelaksanaan dan pengelolaan SIMPEG di Kota Bandung. **Kesimpulan:** Berdasarkan uraian dari Teori Unsur Manajemen yang ada dilapangan, pengelolaan SIMPEG di Kota Bandung sudah baik. Namun masih perlunya upaya dari BKPSDM Kota Bandung untuk dapat memberikan sosialisasi dan pelatihan secara berkala kepada pegawai pengelola maupun kepada pengguna SIMPEG serta memaksimalkan fasilitas sarana dan prasarana dan juga menindaklanjuti landasan normatif terkait pengelolaan dan pelaksanaan SIMPEG di Kota Bandung.

**Kata Kunci: Pengelolaan, Pegawai, SIMPEG, Manajemen**

1. **PENDAHULUAN**
	1. **Latar Belakang**

Pengelolaan data pegawai merupakan hal yang tidak bisa dihindari pada institusi pemerintah sebagai sarana untuk menyimpan sebuah informasi dan data - data menjadi terstruktur serta sistematis. Bidang kepegawaian adalah salah satu bidang yang mengurus berbagai hal mengenai data pegawai yang mencakup perencanaan, pengolahan, pengadaan, pensiun, mutasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan data serta informasi pegawai. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang kemudian disebut dengan SIMPEG merupakan sebuah aplikasi mengenai berbagai hal tentang kepegawaian dengan berbasis web yang ditujukan untuk pegawai sehingga dapat mengakses dan mengelola data serta proses dalam kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah. SIMPEG juga merupakan sarana bagi pegawai untuk menunjang karier, pensiun, kenaikan gaji, golongan, mutasi dan lain sebagainya yang bisa diakses melalui SIMPEG.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung sebagai lembaga teknis daerah berbentuk badan yang merupakan unsur staf penunjang urusan yang menyelenggarakan fungsi – fungsi administratif sekaligus menyusun konsep – konsep, gagasan – gagasan dan terobosan – terobosan di bidang kepegawaian, tentunya merupakan unsur yang sangat penting bagi terlaksananya Sistem Informasi ASN tesebut. Berdasarkan data dari BKPSDM Kota Bandung bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2020 berjumlah 14.657 orang. Jumlah pegawai yang banyak tersebut memaksa BKPSDM Kota Bandung perlu mengoptimalkan pengelolaan SIMPEG sebagai sistem yang mengelola data kepegawaian.

Jumlah pegawai yang banyak di seluruh SKPD Kota Bandung tersebut menyebabkan pengelolaan SIMPEG pada BKPSDM Kota Bandung tentunya tidak selalu berjalan dengan baik. Permasalahan yang terjadi tentu akan selalu didapati seiring berjalannya pelaksanaan SIMPEG pada BKPSDM Kota Bandung.

* 1. **Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Berbagai masalah muncul, berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKPSDM Kota Bandung Tahun 2020 menunjukkan jumlah pegawai pada bagian Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian berjumlah 4 orang dimana pegawai tersebut menangani pengelolaan dan pelaksanaan SIMPEG pada BKPSDM Kota Bandung.

Faktor yang menyebabkan penumpukan daftar status salah satunya ialah kesalahan pegawai dalam menginput data sehingga pengelolaan SIMPEG masih sering dinilai kurang efektif karena data yang diterima tidak valid. Selain itu, karena SIMPEG dapat mempengaruhi terhadap jalan karier dalam pengambilan keputusan Manajemen ASN maka banyak sekali pegawai yang tergesa – gesa dalam meinput data sehingga terjadinya banyak kesalahan yang menyebabkan terhambatnya proses dalam pengolahan data berikutnya pada SIMPEG. Lemahnya jaringan serta alat pendukung seperti sarana dan prasarana menjadi faktor yang menjadi terhambatnya pengelolaan SIMPEG di BKPSDM Kota Bandung.

Maka dapat diketahui berdasarkan hasil *research* penulis, bahwa identifikasi masalah ialah terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan SIMPEG, kurangnya sosialisasi terhadap pelaksanaan SIMPEG, penumpukan data pegawai, tidak validnya data yang diterima oleh pengelola SIMPEG, lemahnya jaringan serta sarana dan prasarana penunjang pengelolaan SIMPEG.

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) maupun dalam konteks pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Penelitian Muh. Akbar Syahruddin berjudul *Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan* (Syahruddin, 2019), menemukan bahwa pelaksanaan SIMPEG di BKD Provinsi Sulawesi Selatan sudah berjalan dengan baik dengan penyediaan informasi secara cepat dan akurat dalam pengambilan sebuah keputusan sedangkan faktor penghambatnya ialah kurangnya sumber daya manusia selaku pengolah data informasi sehingga SIMPEG belum maksimal. Penelitian Yuni Aidina Adha berjudul *Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian UIN Suska Riau* (Adha, 2017), menemukan bahwa pelaksanaan SIMPEG di Bagian Kepegawaian UIN Suska Riau sudah berjalan baik namun masih adanya beberapa kendala diantaranya belum ada SOP yang jelas mengenai pengelolaan SIMPEG, jaringan yang tidak mendukung terhadap pelaksanaan SIMPEG dan kurang efisiennya penggunaan SIMPEG sebagai database bagi kepentingan pegawai. Penelitian Faria Ruhana berjudul *Implementasi SIMPEG dalam Kerangka Tertib Administrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur* (Ruhana, 2019), menemukan bahwa implementasi SIMPEG terhadap tertib administrasi kepegawaian di BKD Kabupaten Magetan sudah dilaksanakan cukup baik namun masih ada kendala seperti terbatasnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan data yang belum lengkap dan kurangnya sarana komputer yang sesuai dengan kebutuhan serta sebagian proses SIMPEG masih belum dijalankan dengan online.

* 1. **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dengan lokus di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Selain itu pengukuran atau indikator yang digunakan juga berbeda dari penilitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat atau teori Unsur Manajemen yang dikemukakan oleh Hasibuan (2018) yang menyatakan bahwa unsur yang dapat dikatakan bahwa pengelolaan dikatakan baik jika telah memenuhi dimensi *men, money, methods, materials, machines and market*.

* 1. **Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan mengenai pengelolaan terkait pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

1. **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Selain itu penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumen. Data yang didapatkan juga berasal dari sumber data primer dan data sekunder. Informan diambil berdasarkan teknik *purposive sampling* dimana sampel atau informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Sedangkan instrumen penelitian yaitu penulis sebagai *human instrument.* Penulis melakukan reduksi data untuk memilah data yang dapat dirangkum dan berkaitan dengan penelitian, kemudian penulis akan melakukan penyajian data dengan hipotesis yang dibuat dan yang terakhir penulis melakukan penarikan kesimpulan terkait data yang ada dengan hasil yang di dapat di lapangan.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Daerah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan pendapat dari Hasibuan yaitu Unsur Manajemen dengan 6 (enam) dimensi, yaitu *men, money, methods, materials, machines and market*. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut.

* 1. **Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat**
		+ - 1. ***Men* (Manusia)**
1. **Kemampuan Pegawai**

**Tabel 1. Sumber Daya Manusia pada Sub Bagian SIMPEG BKPSDM Kota Bandung**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama** | **Pangkat** | **Eselon** | **Jabatan** |
| 1. | Angga Fitrah Yulianto, ST | Penata (III/c) | IV.a | Kepala Sub Bidang SIMPEG |
| 2. | Bayu Rimba, ST, M.Kom | Penata Muda Tingkat I (III/b) | Fungsional Tertentu | Pranata Komputer Pertama |
| 3. | Choirul Arifin, ST | Penata Muda (III/a) | Fungsional Umum | Ahli Pertama – Pranta Komputer |
| 4. | Asep Darmawan, S.Kom | Penata Muda (III/a) | Fungsional Umum | Ahli Pertama – Pranta Komputer |
| 5. | Ismail S. Halim, S.Kom | Penata Muda (III/a) | Fungsional Umum | Ahli Pertama – Pranta Komputer |
| 6. | Andini H. Ulya, S.Kom | Penata Muda (III/a) | Fungsional Umum | Ahli Pertama – Pranta Komputer |

*Sumber : Sumber : BKPSDM Kota Bandung diolah Tahun 2021*

Kemampuan SDM yang ada untuk dapat mengelola SIMPEG sangat mumpuni sesuai dengan standar kualifikasi yang dibutuhkan pada bagian SIMPEG. Akan tetapi, kurangnya SDM yang ada sehingga perlunya bantuan pihak ketiga *freelancer* tersebut guna melengkapi proses pengelolaan dan pelaksanaan SIMPEG yang dibentuk oleh BKPSDM Kota Bandung agar dapat berjalan dengan baik. Kemampuan yang dimiliki para pegawai pada bidang SIMPEG tentunya berbeda dengan bidang lain. Hal ini dikarenakan perlunya kualifikasi khusus bagi staf di bidang SIMPEG karena menyangkut semua yang berkaitan dengan komputer, server, jaringan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan informatika. Meskipun kualifikasi yang sesuai telah memenuhi standar pegawai di Bidang SIMPEG di BKPSDM Kota Bandung, pelatihan mengenai jabatan fungsional pranata komputer harus tetap dilaksanakan untuk perkembangan pengelolaan SIMPEG.

1. **Peran Pegawai**

Peran pegawai pada bidang SIMPEG di BKPSDM Kota Bandung sangat berpengaruh dan memiliki tanggung jawab masing – masing dalam mengengerjakan tugas yang dikerjakan pada setiap harinya. Proses pengelolaan pun sangat dipengaruhi oleh peran pegawai pada bidang SIMPEG di BKPSDM Kota Bandung. Seluruh inovasi dan kreativitas lahir dari peran pegawai yang hadir pada saat bekerja maupun kendala dan hambatan yang terjadi dilapangan yang dalam hal ini ialah pada server.

Peran pegawai sangat memenuhi kualifikasi, hal ini terlihat pada saat jam kerja, seluruh staf mengerjakan tanggung jawab yang telah diberikan kepada setiap individu diantaranya ialah *coding*, memverifikasi data, membenarkan *bugs,* memberikan umpan balik kepada pengguna yang masuk dalam server dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaksanaan SIMPEG. Meskipun masih banyaknya kedala dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan SIMPEG, akan tetapi peran pegawai dalam melaksanakan SIMPEG sangat berpengaruh signifikan terkait perkembangan server. Untuk itu perlu adanya evaluasi maupun pelatihan serta sosialisasi secara rutin dan berkala baik kepada pegawai maupun kepada PNS di lingkungan pemerintahan Kota Bandung selaku pengguna SIMPEG atau SIMPEG.

1. **Manfaat Pengguna**

Dalam pengelolaan SIMPEG, manfaat pengguna tersebut harus dapat dirasakan oleh pengguna yang dalam hal ini ialah PNS di lingkungan pemerintahan Kota Bandung. Manfaat pengguna ini dapat dirasakan secara maksimal jika admin pengelola dari tiap satuan perangkat daerah di Kota Bandung dan para pegawai bekerja sama untuk bisa memaksimalkan data yang bisa dikirimkan pada server. Begitu pula pada sumber daya manusia selaku pengelola SIMPEG yang juga harus memberikan pelayanan yang baik sehingga admin pengelola SIMPEG pada setiap perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Masih perlunya inovasi dan pembaharuan pada SIMPEG agar seluruh PNS di lingkungan pemerintahan Kota Bandung dapat mengakses dan menginput sendiri data kepegawaian mereka masing – masing sehingga tugas dan fungsi dari admin pengelola SIMPEG pada setiap satuan perangkat daerah dapat lebih maksimal karena tanggung jawab ada pada PNS itu sendiri dalam mengaktualkan data kepegawaian pribadinya masing – masing. Oleh karena itu, inovasi dalam manfaat pengguna ini masih perlu ditingkatkan kembali sehingga pengelolaan dan pelaksanaan SIMPEG dapat berjalan lebih maksimal.

* 1. ***Money* (Uang)**

Sumber daya anggaran bagi pengelolaan SIMPEG di BKPSDM Kota Bandung aman dan memadai. Pencapaian tersebut perlu dipertahankan dan terus dikembangkan dengan proses penganggaran yang benar disetiap tahunnya agar anggaran bagi pengelolaan SIMPEG terus seimbang dan tidak menghambat proses pengelolaan serta pelaksanaan SIMPEG yang mana Kota Bandung sekarang sudah menjadi *“smart city*” bagi implementasi digital di lingkungan pemerintahan Kota Bandung. Selain itu, guna mencapai sararan tugas dan fungsi bidang SIMPEG maka diperlukan kestabilan anggaran yang sudah memadai hingga saat ini.

* 1. ***Methode* (Metode)**
1. **Tahapan Pelaksanaan**

**Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan SIMPEG di BKPSDM Kota Bandung**



*Sumber : BKPSDM Kota Bandung diolah Penulis Tahun 2022*

Metode mengenai pengelolaan SIMPEG dilakukan oleh admin khusus di Bidang SIMPEG BKPSDM Kota Bandung selaku pengelola SIMPEG bagi seluruh pengguna yaitu PNS di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung. Admin tersebut dapat dikatakan juga sebagai operator selaku penghubung dengan seluruh admin SIMPEG pada setiap OPD yang ada di Kota Bandung. Biasanya dengan runtutan melalui admin – admin pengelola tersebut, admin pusat dapat mengetahui apakah metode mengenai pengelolaan SIMPEG dapat berjalan dengan baik atau tidak.

1. **Panduan Pengelolaan**

Panduan pengelolaan telah diberikan oleh pimpinan secara langsung untuk dipedomai oleh admin, pengelola maupun pengguna. Hal ini di dukung oleh peran admin pengelola SIMPEG pada setiap perangkat daerah di Kota Bandung dibawah Bagian Umum dan Kepegawaian yang mengerti akan kondisi pegawai di perangkat daerah tersebut sehingga dapat memberikan pengaruh yang positif dalam menjalankan panduan atau pun himbawan yang diberikan oleh pimpinan untuk mentaati pedoman pengelolaan SIMPEG.

Panduan Pengelolaan ini sengaja dibuat agar hambatan terkait pengelolaan SIMPEG dapat teratasi dan memudahkan admin pusat dalam mengelola SIMPEG dan memudahkan pengguna dalam melaksanakan sistem tersebut. Harapan dari BKPSDM Kota Bandung selaku perangkat daerah atau badan pengelola SIMPEG bagi PNS di lingkungan pemerintahan Kota Bandung dengan adanya panduan pengelola ini ialah mengefektifkan program kerja yang ada pada SIMPEG sehingga efektif bagi *database* kepegawaian untuk seluruh PNS di Kota Bandung yang jumlahnya kini mencapai 14.276 orang menurut Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kota Bandung tahun 2020.

* 1. ***Materials* (Bahan)**
1. **Data**

Data dibutuhkan sebagai bahan utama dalam pengelolaan SIMPEG. Selain itu, ditinjau dari apa yang penulis dapatkan dilapangan bahwa data yang ada pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawain sudah mumpuni sebagai *database* bagi pengelolaan data kepegaaian secara akurat. Namun pada hasil observasi penulis, masih saja ditemukan beberapa pegawai yang belum memenuhi ketentuan data yang dibutuhkan oleh sistem sehingga banyak data yang dibutuhkan sulit dicari dan tidak valid. Untuk itu perlu adanya evaluasi bagi pengelola dan sosialisasi bagi para pegawai. Pernyataan tersebut didukung berdasarkan data yang penulis olah pada saat berada dilapangan mengenai data yang dibutukan pada SIMPEG. Data yang dibutuhkan oleh SIMPEG yang penulis dapatkan pada website resmi SIMPEG Kota Bandung (www.simpeg.bandung.go.id) pada tanggal 10 Januari 2022 antara lain :

1. List Pegawai (NIP, Pangkat, Golonggan, Jabatan, Status Pegawai dan Masa Kerja)
2. Data Pribadi (Nama, Tempat Tanggal Lahir, No. HP dan Alamat)
3. Riwayat Anak
4. Riwayat Orangtua
5. Riwayat Saudara
6. Riwayat Tambahan (Keahlian dan Kemampuan Bahasa)
7. Riwayat PLT atau PLH
8. Riwayat Cuti Pegawai
9. Dokumen Manajemen Sistem (SK, KK, Akta, Ijazah, Akses, Kartu Pegawai, NPWP, Standar Penilaian Kinerja atau SKP dan Sertifikat)
10. Riwayat Kedudukan Hukum
11. Angka Kredit
12. Riwayat Pendidikan Formal
13. Riwayat Kepangkatan
14. Riwayat Jabatan
15. Riwayat Kenaikan Gaji Berkala atau KGB
16. Penambahan Masa Kerja atau PMK
17. Catatan Hukuman Disiplin
18. Riwayat Diklat Fungsional
19. Riwayat Diklat Teknis
20. Riwayat Diklat Struktural
21. Riwayat Penghargaan
22. Riwayat Istri atau Suami
23. **Sosialisasi Pelaksanaan**

Sosialisasi terkait pelaksanaan guna menunjang pengelolaan SIMPEG telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut juga terlihat dari hasil observasi yang penulis dapatkan pada saat proses penelitian, bahwasanya proses pengelolaan SIMPEG di BKPSDM sudah berjalan dengan baik dan lancar. Namun masih adanya kendala yang didapat seperti *human error* atau pun *bugs* yang dialami pada server, dimana penulis melihat dari proses kerja yang dilakukan oleh para pengelola SIMPEG pada bagian SIMPEG di BKPSDM. Namun selebihnya SIMPEG sudah berjalan dengan baik dan pada saat ini SIMPEG Kota Bandung sedang memasuki tahap pembaharuan atau inovasi.

* 1. ***Machine* (Mesin)**
1. **Sarana dan Prasarana**

Mesin atau fasilitas sarana dan prasarana penunjang pengelolaan SIMPEG sudah memadai. Meskipun tidak semua fasilitas merupakan alokasi dari lembaga untuk digunakan bagi para pegawai selaku pengelola SIMPEG, namun mesin dan fasilitas yang ada sudah sangat membantu jalannya pengelolaan SIMPEG di BKPSDM Kota Bandung. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada Bidang SIMPEG sudah memadai. Hal ini dapat dilihat dari data yang penulis dapatkan dilapangan pada saat penelitian ialah sebagai berikut :

**Tabel 2. Rekapitulasi Inventaris Barang Peralatan dan Mesin di BKPSDM Kota Bandung pada Bidang SIMPEG Tahun 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Jumlah** |
| 1. | Komputer PC | 7 unit |
| 2.  | Laptop | 4 unit |
| 3. | Notebook | 3 unit |
| 4. | Printer | 5 unit |
| 5. | Server | 6 unit |
| 6. | Hardware (Perangkat Keras) | 3 unit |
| 7. | Processor | Intel Xeon Silver 4216 2.1 Ghz |
| 8. | RAM | 10 GB |
| 9. | Storage | 750 HDD |
| 10. | Software (Perangkat Lunak) | 5 unit |
| 11. | Operating System | Ubuntu 16.04.6 LTS |
| 12. | Programming Language | PHP 7.0.33 |
| 13. | Programming Framework | Laravel 5.1 |
| 14. | Database Engine | PostgreSQL 9.5 |
| 15. | Web Application | nginx 1.10.3 |
| 16. | Ruang Kerja | 1 unit |
| 17. | Bilik Kerja | 5 unit |
| 18. | Kursi | 10 unit |
| 19. | Meja | 6 unit |
| 20. | Wireless Accespoint | 4 unit |
| 21. | Swic Hub | 4 unit |

*Sumber : Data Kartu Inventaris Barang (KIB) Perlatan dan Mesin Kota Bandung Tahun 2021 diolah penulis Tahun 2022*

* 1. ***Market* (Pasar)**

Pasar dalam pengelolaan SIMPEG sudah digunakan dengan baik yaitu dalam hal penerapan teknologi informasi. Umpan balik yang diberikan PNS di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung selaku pengguna SIMPEG juga tersampaikan dengan baik. Banyak dampak positif atau manfaat yang dirasakan oleh pengguna SIMPEG. Namun, terdapat juga dampak negatif atau kendala yang dapat dirasakan oleh pengguna SIMPEG.

Semua yang terjadi di pasar terkait pengelolaan dan pelaksanaan SIMPEG ditampung oleh para pegawai pengelola SIMPEG yang kemudian dicarikan solusi yang baik guna meningkatkan pengelolaan dan pelaksanaan SIMPEG. Sehingga produk pasar yang dihasilkan berdasarkan umpan balik dan inovasi dari para pengelola SIMPEG di BKPSDM Kota Bandung tepatnya Bidang SIMPEG ialah “SIMPEG ADM” dimana, SIMPEG ADM merupakan satu kesatuan dari SIMPEG yang memiliki keunggulan dapat diakses oleh semua PNS di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung tanpa melalui perantara admin pengelola SIMPEG pada setiap perangkat daerah. Selain itu, SIMPEG ADM dapat memberikan pelayanan kepada pengguna tanpa melalui perantara. Hal lainnya ialah pengguna dapat memperbaharui, mengakses dan mendapatkan informasi terkait perbaikan dan *verifikasi* dari server secara langsung. Namun pengawasan dalam sistem ini tetap terjaga, karena setiap para pengguna tidak dapat mengakses profil pegawai lain sehingga keamanan data kepegawaian pada setiap pegawai dapat dipastikan aman.

* 1. **Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pengelolaan SIMPEG di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat**

Melihat upaya yang dilakukan BKPSDM Kota Bandung dan menyamakan persepsi terkait teori Unsur Manajemen dengan yang terjadi di lapangan, penulis dapat menyimpulkan upaya – upaya yang dapat dilakukan ialah sebagai berikut :

1. Adanya pelatihan secara berkala yang dilakukan kepada setiap pegawai pengelola pada Bidang SIMPEG dan admin pegelola pada setiap OPD di Kota Bandung.
2. Adanya pengawasan dan peran Kepala BKPSDM Kota Bandung dalam melaksanakan sosialisasi, metode, serta alur pelaksanaan terkait pengelolaan SIMPEG yang diupayakan dapat dilakukan secara berkala agar dapat mengetahui sejauh mana pemahaman para pengelola maupun admin pengelola terkait pelaksanaan dan pengelolaan SIMPEG.
3. Adanya tindaklanjut mengenai landasan hukum yang mengatur mengenai pengelolaan SIMPEG di BKPSDM Kota Bandung sehingga dapat menjadi pedoman dan acuan yang jelas bagi pengelola maupun pengguna SIMPEG.
	1. **Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bandung telah berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif bagi Pegawai Negeri Sipil atau PNS di Kota Bandung. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pembaharuan atau inovasi yang terus dikembangkan oleh bagian SIMPEG di BKPSDM Kota Bandung selaku pengelola atau biasa disebut sebagai admin pusat SIMPEG. Salah satu pembaharuan yang dihasilkan ialan SIMPEG ADM yang menyediakan pelayanan individu kepada PNS untuk dapat mengakses data pribadi dan kebutuhan pelayanannya secara mandiri.

Inovasi yang ditampilkan oleh bagian SIMPEG BKPSDM Kota Bandung memberikan warna tersendiri bagi SIMPEG di Kota Bandung. Dengan begitu, SIMPEG di Kota Bandung jauh lebih unggul dibandingkan dengan SIMPEG di daerah lain. Seperti temuan yang didapatkan (Syahruddin, 2019) pada pelaksanaan SIMPEG di BKD Provinsi Sulawesi Selatan, dimana pada temuan tersebut hanya terdapat penyediaan informasi secara cepat dan akurat dalam pengambilan sebuah keputusan. Tidak adanya layanan mandiri seperti inovasi yang dibuat oleh SIMPEG di Kota Bandung.

Namun dengan begitu, temuan (Adha, 2017) mengenai pelaksanaan SIMPEG di Bagian Kepegawaian UIN Suska Riau terkait belum ada SOP yang jelas mengenai pengelolaan SIMPEG masih sama dengan kendala yang ditemukan pada SIMPEG di Kota Bandung. SOP atau landasan hukum secara resmi dan menyendiri terkait SIMPEG belum di keluarkan oleh pemerintah setempat. Dengan demikian aturan yang mengikat SIMPEG hanya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun Tahun 200 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

1. **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian mengenai “Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat” berdasarkan target capaian penelitian ialah sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan yang dapat penulis simpulkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ialah pengelolaan SIMPEG di BKPSDM Kota Bandung telah berjalan sesuai dengan pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Setiap pegawai mampu bekerja sama satu sama lain dalam mengelola dan melaksanakan SIMPEG baik staf bidang SIMPEG, Kepala Sub Bidang SIMPEG maupun Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian telah berkoordinasi dalam memaksimalkan pengelolaan SIMPEG dengan pengelolaan SIMPEG yang terus meningkat dan terlihat progresnya.
2. Beberapa faktor penghambat pengelolaan SIMPEG diantaranya ialah sebagai berikut :
* Kurangnya pembinaan pegawai dalam hal ini pengguna SIMPEG untuk memahami pengelolaan dan pelaksanaan SIMPEG maupun sistem digitalisasi yang sudah mulai di terapkan bagi pegawai di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bandung.
* Sarana dan prasarana tidak di sediakan secara khusus dari pemerintah Kota Bandung bagi pegawai di Bidang SIMPEG dalam melaksanakan pengelolaan SIMPEG sehingga proses pengelolaan masih menggunakan sarana dan prasarana pribadi pegawai pengelola dan terkait server masih bekerja sama dengan dinas lain yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
* Kurangnya kesadaran pegawai di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bandung secara menyeluruh untuk bisa memahami sistem digital dan proses penginputan data pegawai dimana hal ini dapat mempengaruhi pengelolaan SIMPEG.
1. Upaya yang dilakukan oleh aparatur BKPSDM Kota Bandung khususnya Bidang SIMPEG dalam mengatasi hambatan – hambatan yang terjadi antara lain :
* Pembinaan pegawai lingkup Pemerintahan Kota Bandung melalui pelatihan terkait pengelolaan dan pelaksanaan SIMPEG maupun terkait sistem digital yang sudah mulai diterapkan di Kota Bandung untuk meningkatkan kinerja pegawai di Bidang SIMPEG BKPSDM Kota Bandung.
* Mengajukan fasilitas sarana dan prasarana kepada pimpinan untuk memiliki jaringan server sendiri dalam mengelola SIMPEG bersamaan dengan lahirnya SOP (Standar Operasional Prosedur) dan landasan normatif mengenai SIMPEG di Kota Bandung.
* Melahirkan inovasi yaitu SIMPEG ADM sehingga pegawai dipaksa untuk memahami sistem digital dan penginputan serta pengelolaan SIMPEG karena semua layanan manajemen kepegawaian telah menjadi tanggungjawab pegawai secara individu pada SIMPEG tersebut.

**Keterbatasan Penelitian.**

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan dalam satu Organisasi Perangkat Daerah atau OPD saja sehingga tidak ada perbandingan pada Organisasi Perangkat Daerah lain terkait Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sebagai model dari penelitian yang dipilih berdasarkan teori atau pendapat Unsur Manajemen yang dikemukakan oleh Hasibuan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work)***

Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

1. **UCAPAN** **TERIMA** **KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan baik berupa dukungan moril maupun materil yang tiada henti. Kemudian ucapan terima kasih juga di ucapkan kepada Pemerintah Kota Bandung terutama Bapak Ir. H. Adi Junjunan Mustafa, Mc selaku Kepala BKPSDM Kota Bandung dan seluruh keluarga besar Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian dan Bidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian terutama Ibu Hj. Siti Fitria Sa’adah, S.STP, M.T., Angga Fitrah Yulianto, ST., Bayu Rimba Pratama, ST, M.Kom., yang telah banyak membantu dan memfasilitasi penulis dalam melaksanakan proses penelitian. Selain itu, ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Drs. Udaya Madjid, S.Pd selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Mustaufik Amin, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran. Serta kepada semua pihak yang telah menjadi bagian atas keberhasilan penulis dalam melaksanakan penelitian ini.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Anggito dan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak

Chandra dan Rifa'i. 2016. *Dasar Dasar Manajemen*. Medan: Perdana Publishing.

Hasibuan, Malayu S.P. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

-------------., 2019 *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Henry, Simamora. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: BPFE.

Kartoyo. 2016. *Dasar - Dasar Manajemen*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.

Larasati, Sri. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Madjid, Udaya dan Asep Hendra. 2015. *Manajemen Sumber Daya Aparatur.* Sumedang: IPDN Press.

Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif : Quantitative Research Approach*. Yogayakarta: CV. Budi Utama.

Sedarmayanti. 2014. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar Maju.

Sholihah, Qamariyatus. 2020. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Malang: UB. Press.

Simangunsong, Fernandes. 2016 *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Terry, George R. 2012. *Prinsip Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 200 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2021 tentang Keududkan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 055 Tahun 2009 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2019 - 2023

* + - * 1. **Lain - lain**

Syahruddin, Muh. Akbar. 2019. *“Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”,* Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Adha, Yuni Aidina. 2017. *“Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Bagian Kepegawaian UIN Suska Riau”,* Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ruhana, Faria. 2019. *“Implementasi SIMPEG dalam Kerangka Tertib Administrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur”,* Jurnal Media Bina Ilmiah Vol. 13, Jakarta: Bina Patria

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung Tahun 2020

 Website Resmi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) BKPSDM Kota Bandung [www.simpeg.bandung.go.id](http://www.simpeg.bandung.go.id)

Website Resmi SIMPEG ADM BKPSDM Kota Bandung <https://simpeg-adm.bandung.go.id/login>

Kota Bandung Dalam Angka Tahun 2021 oleh Badan Pusat Statistik Kota Bandung

Bandungkota.go.id’ <https://bandungkota.go.id/halaman/sejarah>

<https://ppdbkotabandung.wordpress.com/pustaka/peta-kota-bandung/> diakses pada tanggal 11Februari 2020

<https://ppid.bandung.go.id/?media_dl=9872> diakses pada tanggal 15 Februari 2020

<https://www.geografi.org/2017/12/kondisi-geografi-kota-bandung.html> diakses pada tanggal 18 Februari 2020

<https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_9457fca592_BAB%20IIBAB%202%20RPIJM%20Kota%20Bandung_PDF.pdf> diakses pada tanggal 20 Februari 2020